

BAB V

Penutup

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang Peneliti uraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Politik uang pada Pilkada 2020 di Desa Pulau Rantau benar-benar terjadi, dengan "serangan fajar" yang dilakukan oleh semua paslon melalui tim mereka, seperti yang diakui oleh anggota tim FF bahwa mereka melakukan pembagian dan penjagaan pada malam hari sebelum pencoblosan esoknya. Selain itu, *Money politics* hanya mencakup "serangan fajar" dan penggunaan uang oleh pemerintah dan masyarakat, dan Undang-Undang Pilkada hanya membatasi *Money politics* yang terjadi selama kampanye. Dalam landasan teori, fenomena *Money politics* merupakan risywah yang sanksinya belum ditetapkan syara dan memberikan wewenang kepada hakim atau pembuat undang-undang untuk menetapkan sanksi. Namun, karena regulasi saat ini memiliki celah yang kuat untuk pelaku *Money politics*, peraturan sanksi politik uang menunjukkan adanya politik kepentingan yang kuat.
2. Tanggapan masyarakat Desa Pulau Rantau terhadap praktik *Money politics* sebagian tidak mempengaruhi pilihan masyarakat Desa Pulau Rantau karena masyarakat memilih paslon berdasarkan figur paslon dan partai politik yang menaunginya. Selain itu, karena masyarakat Desa Pulau Rantau sering menggunakan hak pilih sebagai cara untuk menunjukkan identitas kelompok mereka, tradisi, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Masyarakat Desa Pulau Rantau terus menerima *Money politics* karena berbagai alasan, termasuk ekonomi, pendidikan, kurangnya pengawasan, dan budaya. Selain itu, alasan lain mengapa mereka menerima *Money politics* adalah peraturan hukum yang umumnya menahan penerima *Money politics* dalam KUHP Pasal 149 ayat (2).

B. Rekomendasi

Perlu adanya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat oleh desa, partai politik, dan pihak berwenang untuk menginformasikan masyarakat tentang *Money politics* dan bahayanya.

Undang-undang yang mengatur *Money politics* harus diatur secara khusus dan tegas baik selama kampanye maupun menjelang pemungutan suara serta pengawasan Pilkada harus lebih ketat dan tidak pandang bulu untuk meminimalisir adanya *money politics*.